

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang merupakan negara dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas negara berkembang secara bertahap. Umumnya negara berkembang memiliki permasalahan yang terbilang rumit dalam melaksanakan pembangunan. Diantaranya adalah disparitas wilayah dan sektoral, yaitu kesenjangan pembangunan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perkembangan kota yang diharapkan dapat memberikan efek penetesan ke bawah (*trickle down effect*) sebagai pusat pertumbuhan, nyatanya belum semua terlaksana demikian, bahkan tidak sedikit yang berdampak pada eksploitasi sumberdaya dari wilayah sekitarnya. Kesenjangan wilayah ini dicirikan oleh adanya perbedaan dari tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya di masyarakat. Hal itu kemudian membuat investasi yang dilakukan di perdesaan menjadi terbatas karena terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas umum di perkotaan sehingga secara ekonomi tidak efisien.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Perroux (1955) yang menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak dapat berlangsung secara merata. Berbagai faktor, baik faktor alami (geografis, sumberdaya manusia, sumberdaya alam) maupun faktor hasil kebudayaan (infrastruktur dan sumberdaya sosial) tersebar secara tidak merata di muka bumi ini. Akibatnya, selain menimbulkan kesenjangan dalam pembangunan, juga mengakibatkan terciptanya daerah tertinggal atau terbelakang (*hinterland*).

Salah satu alternatif upaya penataan ruang yang disampaikan oleh Hirschman (1958) dalam rangka pemerataan wilayah adalah dengan menetapkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sejak berakhirnya reformasi tahun 1999, penetapan pusat-pusat pertumbuhan baru atau lebih dikenal dengan daerah otonomi telah menjadi isu yang sering diperbincangkan, terutama oleh pemerintah daerah. Terlebih dipicu juga oleh pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 yang sebelumnya adalah UU No. 22 Tahun 1999

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan hak otonomi, yaitu kekuasaan dalam mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam menambah atau memekarkan juga mengurangi atau menggabungkan daerah-daerah otonomi. Jika dibandingkan dengan penggabungan daerah, yang terjadi justru lebih banyak daerah yang memekarkan diri. Pemekaran daerah menjadi suatu daerah otonomi baru muncul dengan beragam alasan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemekaran daerah menjadi otonomi baru juga dilatarbelakangi oleh beberapa alasan lain, diantaranya yaitu: (1) terjadinya disparitas wilayah; (2) terlalu luasnya wilayah geografis sehingga pelayanan terhadap penduduk menjadi tidak efektif dan efisien; (3) iming-iming insentif fiskal; (4) perbedaan civil society yang berkembang di masyarakat; dan (5) status kekuasaan (Tenrini, 2013).

Selama kurun waktu 11 tahun, tepatnya sejak tahun 2001-2012, Provinsi Jawa Barat telah memekarkan setidaknya 4 daerah otonomi baru setingkat kabupaten, diantaranya yaitu Kota Banjar, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya, salah satu daerah yang sedang dicanangkan menjadi calon daerah otonomi baru di Jawa Barat adalah Kabupaten Cianjur Selatan. Sebagaimana namanya, CDOB tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Cianjur bagian selatan yang sedang dicanangkan untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru.

Dikutip dari surat kabar Cakrawala Media (2020) menyebutkan bahwa wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Barkah Surahman, memberikan usulan mengenai pemekaran DOB Cianjur Selatan menjadi kabupaten baru untuk diproses pada pembahasan berikutnya di DPRD Jawa Barat. Penetapan ini dilandaskan pada perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur yang menunjukkan wilayah selatan kurang berkembang dibanding wilayah utara. Sesuai dengan kebijakan nasional, dalam rangka mewujudkan keseimbangan antar wilayah, maka pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur perlu dilakukan. Selain itu, nilai indeks pembangunan manusia yang rendah dan kondisi geografis yang luas sehingga pelayanan terhadap

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penduduk menjadi tidak efektif dan efisien turut melatarbelakangi isu pemekaran daerah ini.

Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Cianjur memiliki luas 3.614.349.800 m² yang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Sukabumi di Jawa Barat. Cianjur terdiri dari 32 kecamatan yang dibagi dalam tiga wilayah pembangunan yaitu, Wilayah Pembangunan Utara, Wilayah Pembangunan Tengah dan Wilayah Pembangunan Selatan. Di samping itu, Kabupaten Cianjur juga mempunyai keunikan tersendiri karena memiliki morfologi yang beragam, yaitu membentang dari utara ke selatan berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga pesisir.

Kementerian Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah Tertinggal juga telah menerbitkan indeks desa membangun di Kabupaten Cianjur sebagai berikut.

Tabel 1.1 Pembagian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Cianjur

Kategori	Kecamatan	Jumlah	SWP
Sangat tertinggal	Pagelaran dan Cikadu	2	Selatan
Tertinggal	Agrabinta, Sindangbarang, Leles, Tanggeung, Pasirkuda, Kadupandak, Takokak, dan Campakamulya	8	Tengahselatan
Berkembang	Warungkondang, Gekbrong, Haurwangi, Cikalongkulon, Naringgul, Cibeber, Cijati, Sukanagara, Cidaun, dan Bojongpicung	10	Utaratengah
Maju	Sukaluyu, Sukaesmi, Campaka, Karangtengah, Cianjur, Cilaku, Cipanas, Cugenang, Ciranjang,	11	Utaratengah

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pacet dan Mande		
--	-----------------	--	--

(Sumber: Kementerian Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah Tertinggal)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cianjur bagian tengah dan selatan terdiri dari lebih banyak desa tertinggal dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Cianjur di bagian utara. Adapun perbandingan kondisi di ketiga satuan wilayah tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Perbandingan Kondisi SWP Utara, Tengah, dan Selatan di Kabupaten Cianjur

Kriteria	SWP Utara	SWP Tengah	SWP Selatan
Jumlah kecamatan	13 kecamatan	7 kecamatan	6 kecamatan
Luas wilayah	104,74 km ² (30,78% dari keseluruhan luas wilayah)	998,97 km ² (28,25% dari keseluruhan luas wilayah)	1.425,5 km ² (40,70% dari luas wilayah keseluruhan)
Kepadatan penduduk	63,90%	19,19%	17,12%
LPE	2,03%	1,81%	2,34%
Pendapatan per kapita	Lebih dari Rp 2,861.000.000 per tahun	Lebih dari Rp 2.227.000.000 per tahun	Lebih dari Rp 2.227.000.000 per tahun

(Sumber: Bahan Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan Tahun 2002)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 mencapai 65,35 dengan angka harapan hidup sebesar 70,13 tahun dan angka melek huruf usia 15 tahun ke atas sebesar 99,02%. Terhitung 6 kali berturut-turut, Kabupaten Cianjur menduduki peringkat terendah dalam IPM

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jawa Barat sejak tahun 2015-2020. Indeks pembangunan manusia tersebut mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah dengan indikator perhitungan kualitas dan kuantitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
Bogor	67,77	68,32	63,13	69,69	70,65	70,4
Sukabumi	64,44	65,13	65,49	66,05	66,87	66,88
Cianjur	62,42	62,92	63,70	64,62	65,38	65,36
Bandung	70,05	70,69	71,02	71,75	72,41	72,39
Garut	63,21	63,64	64,52	65,42	66,22	66,12
Tasikmalaya	63,17	63,57	64,14	65,00	65,64	65,67
Ciamis	68,02	68,45	68,87	69,63	70,39	70,49
Kuningan	67,19	67,51	67,78	68,55	69,12	69,38
Cirebon	66,07	66,70	67,39	68,05	68,69	68,75
Majalengka	64,75	65,25	65,92	66,72	67,52	67,59
Sumedang	69,29	69,45	70,07	70,99	71,46	71,64
Indramayu	64,36	64,78	65,58	66,36	66,97	67,29
Subang	66,52	67,14	67,73	68,31	68,69	68,95
Purwakarta	67,84	68,56	69,28	69,98	70,67	70,82
Karawang	67,66	68,19	69,17	69,89	70,86	70,66
Bekasi	71,19	71,83	72,63	73,49	73,99	74,07
Bandung Barat	65,23	65,81	66,63	67,46	68,27	68,08
Pangandaran	65,62	65,79	66,60	67,44	68,21	68,06
Kota/ Municipality						
Bogor	73,65	74,50	75,16	75,66	76,23	76,11
Sukabumi	71,84	72,33	73,03	73,55	74,31	74,21
Bandung	79,67	80,13	80,31	81,06	81,62	81,51
Cirebon	73,34	73,70	74,00	74,35	74,92	74,89
Bekasi	79,63	79,95	80,30	81,04	81,59	81,5
Depok	79,11	79,60	79,83	80,29	80,82	80,97
Cimahi	76,42	76,69	76,95	77,56	78,11	77,83
Tasikmalaya	69,99	70,58	71,51	72,03	72,84	73,04
Banjar	69,31	70,09	70,79	71,25	71,75	71,7
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09

(Sumber: BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2020)

Selain terjadinya disparitas wilayah, kepemilikan wilayah yang luas, serta tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah dengan ditunjukkan oleh nilai IPMnya yang menduduki peringkat ke-7 berturut-turut di Jawa Barat, pemekaran daerah otonomi Kabupaten Cianjur Selatan juga diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi wilayah selatan Jawa Barat dalam jangka

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

panjang. Oleh karena itu, disamping memperjuangkan pemekaran wilayah, perlu juga dilakukan persiapan-persiapan lain yang dapat mendukung terbentuknya suatu daerah otonomi baru. Secara umum suatu daerah otonomi memiliki sebuah ibukota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi daerah otonomi tersebut, begitu pula dengan CDOB Kabupaten Cianjur Selatan. Pemilihan ibukota kabupaten merupakan suatu hal yang cukup krusial karena dapat menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan tujuan dari pemekaran daerah, yaitu pemerataan wilayah (Direktorat Otonomi Daerah Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 2008).

Secara umum perencanaan pembangunan, dalam hal ini penentuan pusat pertumbuhan wilayah dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (Tarigan, 2015). Pendekatan sektoral berarti memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada pada suatu wilayah. Sedangkan pendekatan regional berperan dalam mengkaji pemanfaatan suatu ruang agar efektif dan efisien termasuk interaksi berbagai kegiatan di dalamnya. Pendekatan regional didasarkan pada asumsi bahwa mobilitas yang terjadi antar wilayah adalah bebas bergantung pada daya tarik yang dimiliki oleh setiap wilayah. Adapun berbagai metode analisis yang dapat dilakukan dalam menganalisisnya antara lain, yaitu: analisis komparatif sumber daya alam, analisis hubungan interregional, dan berbagai teori lokasi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada satu metode saja untuk menentukan pusat pertumbuhan wilayah, yaitu dengan pendekatan lokasi. Hal tersebut dilakukan karena pendekatan lokasi sangat berkaitan erat dengan ilmu geografi yang merupakan latar belakang keilmuan peneliti. Sejak tahun ... banyak ilmuwan yang telah mengkaji dan meneliti mengenai penataan ruang dan pemanfaatan ruang di muka bumi hingga tercipta beragam teori lokasi yang dapat dilakukan untuk menganalisis ketepatan dan kesesuaian suatu lokasi.

Menurut Tarigan (2015), lokasi dapat menggambarkan posisi dari suatu ruang baik itu yang berada di permukaan maupun di dalam bumi, sejauh manusia dapat menjangkaunya. Selanjutnya, teori lokasi menurut Tarigan

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(2015) adalah suatu kajian ilmu yang menyelidiki distribusi geografis dari sumber-sumber daya yang potensial serta hubungannya dengan keberadaan berbagai fasilitas dan kegiatan usaha. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegiatan, para ahli pada mulanya membuat suatu asumsi bahwa lokasi yang dianalisis merupakan suatu ruang yang datar dan kondisinya sama di seluruh tempat. Kemudian, asumsi tersebut secara bertahap dilonggarkan hingga ditemukan kondisi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penentuan pusat pertumbuhan wilayah di calon daerah otonomi baru Kabupaten Cianjur Selatan. Penelitian ini bertujuan agar dapat berkontribusi terhadap rencana pemekaran daerah otonomi Kabupaten Cianjur Selatan sebagai penelitian awal dan memberi masukan kepada para stake holder terutama dalam menentukan pusat pertumbuhan di CDOB Kabupaten Cianjur Selatan. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan di CDOB Kabupaten Cianjur Selatan melalui Pendekatan Teori Lokasi”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur;
2. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah pembangunan di Kabupaten Cianjur;
3. Rendahnya pembangunan di wilayah pembangunan Kabupaten Cianjur bagian tengah dan selatan; dan
4. Adanya isu pemekaran wilayah Kabupaten Cianjur Selatan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Seberapa besar kekuatan sentralitas atas keberadaan sarana infrastruktur pelayanan publik yang tersedia di setiap kecamatan di di calon daerah otonomi baru Cianjur Selatan?
2. Bagaimana kekuatan interaksi di antara kecamatan pusat dengan kecamatan sekitarnya (hinterland) di calon daerah otonomi baru Cianjur Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kondisi ketersediaan sarana prasarana setiap kecamatan di calon daerah otonomi baru Cianjur Selatan; dan

Anita Mardina, 2021

ANALISIS PENENTUAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI CDOB KABUPATEN CIANJUR SELATAN MELALUI PENDEKATAN TEORI LOKASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Menganalisis kondisi struktur pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan di calon daerah otonomi baru Cianjur Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis yang mana sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat keilmuan khususnya dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memperkaya kajian mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Cianjur;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholder sebagai saran dan masukan untuk pengambilan kebijakan
 - c. Sebagai evaluasi dan sumbangan ide bagi penelitian serupa; serta
 - d. Berkontribusi dalam pendidikan geografi, terutama sebagai bahan ajar pada materi perwilayahan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan skripsi disusun dengan menggunakan sistematika yang berdasarkan panduan skripsi, yaitu: bagian awal (pawacana), bagian isi skripsi (pokok skripsi), dan bagian akhir skripsi. Secara sistematis disajikan sebagai berikut.

1. Bagian Awal
Bagian awal skripsi (pawacana) terdiri dari: sampul berjudul, lembar berlogo UPI (sebagai halaman pembatas), persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.
2. Bagian Pokok
Bagian Pokok terdiri dari lima bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung topik penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang lokasi penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, diagram alir penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengupas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum wilayah, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Adapun pada bab ini penulis akan menjawab 3 pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada bagian rumusan masalah sebelumnya. Kemudian ketiga pertanyaan tersebut akan dijawab dan dibahas pada bab iv ini dengan sebagai berikut:

1. Rumusan masalah pertama akan dianalisis berdasarkan keketatan sentralitas dengan menghitung ketersediaan infrastruktur pelayanan publik menggunakan indeks skalogram pada setiap kecamatan di Kabupaten Cianjur bagian selatan; dan
2. Rumusan masalah kedua akan dianalisis berdasarkan kekuatan interaksi dengan menghitung perbandingan jarak dan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Cianjur bagian selatan menggunakan indeks gravitasi serta dilengkapi dengan analisis dari angket (kuesioner).

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran yang berisikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam proposal skripsi dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian.